



## SAMPAH KOTA KE TPST PIYUNGAN

# Sultan Beri Izin hingga Akhir 2025

**YOGYA (MERAPI)** - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengizinkan sampah Kota Yogyakarta dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul hingga akhir 2025.

Sultan menyebut telah berbicara dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ihwal persoalan sampah pada Selasa (16/9). "(Wali Kota Yogyakarta) Sudah bicara sama saya. Jadi, saya minta (sampah) langsung masuk saja (di TPST Piyungan)," ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu

(18/9) Sultan menegaskan kebijakan itu diambil karena Kota Yogyakarta tidak memiliki lahan pembuangan sendiri, sementara kabupaten lain enggan menampung sampah dari luar wilayahnya. Sultan berharap hal itu dapat mengurangi timbunan sampah di de-

po-depo di Kota Yogyakarta.

"Jadi, (sampah) jangan numpuk lagi seperti kemarin di Mandalakrida dan seterusnya. Di kabupaten-kabupaten lain pada nggak mau nampung," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo menyebut sisa daya tampung TPST Piyungan hanya sekitar 2.400 ton hingga akhir 2025. Menurutnya, seluruh kapasitas itu sudah dialokasikan untuk Kota Yogyakarta.

"Itu hitung-hitungan matematis kami sampai di akhir 2025 dan ini sudah kami slotkan ke teman-

man di kota sebenarnya, karena memang yang masih sangat bermasalah adalah kota Yogyakarta," ujarnya.

Menurut Kusno, rata-rata produksi sampah Kota Yogyakarta mencapai 200 ton per hari. Dari jumlah itu, sekitar 90 ton masih dibuang ke TPST Piyungan, sementara sisanya diolah Pemkot dan pihak swasta. "Kalau kita lihat data yang masuk ke (TPST) Piyungan sampai pertengahan September ini 90 ton per hari," terangnya.

Kusno menjelaskan, meski direncanakan ditutup pada Januari

2026, keberlanjutan operasional TPST Piyungan tetap menunggu kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah.

DLHK DIY menargetkan masalah sampah di Yogyakarta bisa tuntas setelah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan teralisasi pada 2027, sesuai rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

"Artinya kota memang belum mandiri. Paling tidak sampai nanti 2027 menunggu PSEL operasional," ujar Kusno. (\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005